**ANALISIS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN**

**PADA PEMBIAYAAN SEGMEN KORPORASI**

**DI BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2018**

 Oleh :

**NAMA: SINGGIH INDRIAWAN**

**NIM: 20173111047**

****

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

**STIE INDONESIA BANKING SCHOOL**

**JAKARTA**

**2020**

**ABSTRACT**

Global warming that is happening at this time in the world and especially in Indonesia requires special handling and one of them is sustainable financial action taken by the banking industry. The purpose of this study is to analysis the application of sustainable finance at Bank Mandiri Syariah (BSM), especially in corporate segment financing. The research method used is descriptive qualitative which aims to answer the problem statement. The formulation of the problem includes: (i) What is the total portfolio financing of the Corporate segment in BSM in 2018; (ii) What is the total portfolio financing of the Corporate segment in BSM during 2018 included in sustainable financial activities; (iii) What is the percentage ratio of sustainable financial implementation of the corporate segment in BSM and BNI in 2018. The results of this study financing the corporate segment in BSM in 2018 amounting to Rp21,291 billion or 31.4% of the total financing in 2018 of 65,752 billion. While the corporate segment financing portfolio in BSM included in the category of sustainable finance in 2018 was Rp.11,113 billion or 52.20% of the total BSM corporate financing of Rp21,291.23 billion. Furthermore, the achievement of the percentage of portfolio financing for the corporate segment included in the criteria for sustainable finance at BSM of 52.20% of total corporate financing is better when compared to the financing of the corporate segment included in the criteria for sustainable finance at Bank BNI amounting to 51.26% of total corporate financing.

*Keywords: Sustainable Finance, Sustainable Financial Reporting, Analysis of the Completeness and Compliance of Sustainability Reporting, Sustainable Financial Reporting Syariah Banking,* Laku Pandai*, POJK 51 Implementation*

## ABSTRAK

*Global warming* yang terjadi pada saat ini di dunia dan khususnya di Indonesia memerlukan penanganan khusus dan salah satunya adalah aksi keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh industri perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank Mandiri Syariah (BSM), khususnya pada pembiayaan segmen korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun rumusan masalah meliputi: (i) Berapa total portofolio pembiayaan segmen Korporasi di BSM tahun 2018; (ii) Berapa total portofolio pembiayaan segmen Korporasi di BSM selama tahun 2018 yang termasuk dalam kegiatan keuangan berkelanjutan; (iii) Berapa prosentase perbandingan pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada pembiayaan segmen korporasi di BSM dan BNI pada tahun 2018. Hasil penelitian bahwa pembiayaan segmen korporasi di BSM tahun 2018 sebesar Rp21.291 miliar atau sebesar 31,4% dari total pembiyaan tahun 2018 sebesar 65.752 miliar. Sedangkan portofolio pembiayaan segmen korporasi di BSM yang masuk dalam kategori keuangan berkelanjutan tahun 2018 sebesar Rp11,113 miliar atau 52,20% dari total pembiayaan korporasi BSM sebesar Rp21.291,23 miliar. Lebih lajut, pencapaian prosentase portofolio pembiayaan segmen korporasi yang masuk kriteria keuangan berkelanjutan di BSM sebesar 52,20% dari total pembiayaan korporasi lebih baik apabila dibandingkan dengan pembiayaan segmen korporasi yang masuk kriteria keuangan berkelanjutan pada Bank BNI sebesar 51,26% dari total pembiayaan korporasi.

Kata kunci : Keuangan Berkelanjutan, Laporan Keuangan Berkelanjutan, Analisa kelengkapan dan Kepatuhan Pelaporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah, Laku Pandai, Penerepan POJK 51.

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Pemanasan global (*Global Warning*) telah menjadi masalah dan perhatian bersama masyarakat Internasional. Salah satu dampak dari pemanasan global yakni perubahan iklim (*Global climate change*) seperti perubahan curah hujan, kenaikan suhu, peningkatan cuaca ekstrim, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai, dan lain sebagainya. Perubahan iklim telah menimbulkan kerugian besar dan bahkan telah mengancam keberlanjutan kehidupan di Planet Bumi. (Kementerian Bapenas 2013). Salah satu penyebab utama terjadinya pemanasan global yaitu meningkatnya intensitas efek Gas Rumah Kaca (GRK) pada atmosfer bumi. Secara alamiah atmosfer bumi diisi gas-gas rumah kaca untuk melindungi dan memelihara temperatur atmosfer bumi agar bumi menjadi nyaman untuk kehidupan.

Pemanasan global juga disebabkan dari faktor perilaku manusia dan pertumbuhan industri yang sangat pesat. Manusia dalam menggerakan kegiatan operasional industri dan transportasi menggunakan bahan fosil yang mengandung [hidrokarbon](http://kitacerdas.com/definisi-hidrokarbon/) seperti batubara, minyak bumi dan gas alam. Hidrokarbon merupakan sumber energi listrik dan panas yang dihasilkan dari pembakaran.

Hasil pembakaran yang tidak sempurna akan menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan karena gas karbon monoksida bersifat racun yang membuat pencemaran udara. Proses industrialisasi di berbagai bidang yang menggunakan bahan bakar fosil dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di bumi karena mengejar pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan penebalan gas karbon selama berpuluh-puluh tahun. Fenomena penebalan ini berevolusi sehingga menyebabkan perubahan iklim (Salim, 2010).

Berdasarkan teori ekonomi makro bahwa perubahan iklim merupakan kegagalan pasar (*market failure*) melakukan pengendalian emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sebagai residu proses produksi barang dan jasa (markiw, 2000). Salah satu indikator dampak perubahan iklim terhadap perekonomian adalah terjadinya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara, yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing (Sukirno, 2002). Perubahan iklim akibat dari pemanasan global akan menyebabkan PDB secara global per kapita 23% lebih rendah jika dibandingkan tanpa pemanasan global, Worland (2015). Berdasarkan laporan dari *Citigroup* ditemukan bahwa kerugian PDB secara global dapat diturunkan sebesar $50 triliun apabila suhu global dapat diturunkan hingga 2,7ºF (1,5ºC) dalam beberapa dekade mendatang (Worland, 2015). Penelitian lain menyebutkan bahwa puncak produktivitas ketika suhu di suatu wilayah rata-rata 55ºF (13ºC), artinya kenaikan suhu sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas di negara-negara utara yang dingin sementara menurunkan produktivitas negara-negara di daerah tropis. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu yang terkendali tidak akan mempengaruhi dunia secara merata (Worland, 2015).

Pandangan secara mikro perubahan iklim menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan biaya operasional perusahaan. Survei yang telah dilakukan oleh *Carbon Disclosure Project* menunjukkan indikasi dari dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan biaya operasional. Sebanyak 2.000 perusahaan yang disurvei ditemukan bahwa 44% diantaranya mengalami gangguan produksi akibat hujan dan kekeringan. Sementara 31% mengalami penambahan biaya produksi. Apabila hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka kemungkinan besar penurunan produktivitas akan terjadi secara global dan tentunya akan sangat merugikan (Liverman & Glasmeier, 2014).

Indonesia diperkirakan akan mengalami *climate departure,* yaitu kondisi di mana suhu rata-rata terendah sudah menjadi lebih tinggi dari pada suhu rata-rata tertinggi sebelumnya di tahun 2029 untuk sebagian besar daerah seperti di Jawa dan Sumatera, bahkan Papua sudah dapat mengalaminya di tahun 2020 menurut Wahyudewi (2016). Negara di dunia rata-rata baru akan mengalami *climate departure* pada tahun 2047. Sektor perekonomian di hy6Indonesia yang paling terdampak *climate departure* adalah sektor pangan. Setiap kenaikan satu derajat celsius pada suhu rata-rata terendah di Indonesia akan menyebabkan hasil panen padi berkurang mencapai 10%. Kekeringan dan suhu panas disinyalir menjadi salah satu penyebab utama panen berkurang seperti yang terjadi di wilayah Aceh pada tahun 2015. Kekeringan akan mengakibatkan produksi panen berkurang mencapai 1,5 ton per hektare. Hasil tangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia juga diperkirakan menurun mencapai 40% (Wahyudewi, 2016).

Kondisi di atas merupakan peringatan nyata yang tidak bisa diabaikan akibat bahaya pemanasan global dan perubahan iklim, mengingat pertanian dan perikanan merupakan dua komoditas terbesar yang berkontribusi pada PDB Indonesia. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka diperkirakan harga berbagai komoditas pertanian dan perikanan akan melonjak sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat. Indonesia dapat mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan *Dutch Disease,* yaitu terjadinya pertumbuhan pembangunan ekonomi yang lambat di negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Hart, 2010; Hartatiningsih, 2011; The Economist, 1977). Menurut Hadad dan Maftuchah (2015:32): “Dalam kaitannya dengan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia bisa dikatakan mempunyai kemiripan dengan fenomena *Dutch Disease.* Tetapi untuk mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami *Dutch Disease* tentu belum sepenuhnya benar, karena diperlukan indikator-indikator lain yang dapat menjadi rujukan dalam memperkuat dugaan tersebut”.

Indonesia sebagai salah satu negara G20 telah menunjukkan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun 2020. Pada Pittsburgh Summit di tahun 2009, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional. Kontribusi tersebut telah diterjemahkan kedalam Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca (RAN GRK). Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, yang lebih dikenal dengan istilah kebijakan *pro growth; pro poor; pro job*; *and* *pro environment,* Hadad et al. (2015). Respon tersebut diwujudkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Masterplan tersebut memuat strategi kebijakan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan (Bappenas, 2011).

Kebijakan *master plan* penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 merupakan salah satu upaya merealisasikan Keuangan Berkelanjutan. Aspek lingkungan hidup sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan yang merupakan hal baru dalam RPJM 2015-2019 yang tidak terdapat pada RPJM 2010-2014. Pembangunan berkelanjutan akan dapat terealisasi apabila tercipta keserasian dan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta diterapkan dalam kegiatan bisnis yang berorientasi pada *profit, people, and planet.* Ketiga aspek tersebut harus didukung dengan aspek tata kelola kelembagaan yang baik atau *good governance* (Hadad et al., 2015)*.* Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi semata, namun juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial. Kerusakan lingkungan hidup dan kesenjangan sosial akan terjadi apabila pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja. Menurut Salim (2010)

 Industri Jasa Keuangan (IJK) merupakan salah satu penyokong pembangunan berkelanjutan, hal ini disebabkan dalam merealisasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dibutuhkan mobilisasi investasi yang besar. Perkiraan tentang investasi tahunan yang dibutuhkan adalah sekitar US $300-530 miliar. Sebagian besar dari investasi ini diperlukan untuk membangun infrastruktur penting, serta area sensitif terhadap lingkungan hidup seperti pertanian, kehutanan, energi, pertambangan dan limbah. Selain itu, pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri juga sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas (Volz, SOAS, University of London, & German Development Institute, 2015). Melalui kegiatan usahanya, industri jasa keuangan dapat berperan melalui pemberian dukungan program-program seperti pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan pada proyek biogas, *micro hydro*, pembangkit listrik tenaga air, pertanian organik, dan lain sebagainya (Hadad et al., 2015). Penerapan keuangan berkelanjutan menjadi sangat penting dilaksanakan pada industri perbankan, dikarenakan industri perbankan menyumbang 79,8% dari total asset keuangan nasional, sedangkan mayoritas bank belum mempertimbangkan lingkungan, sosial dan faktor tata kelola dalam proses peminjaman atau investasi sebagai pertimbangan utama sehingga akan menjadi ancaman bagi pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia (Volz et al., 2015).

Penelitian mengenai keuangan berkelanjutan dilakukan oleh Stampe & Loh (2017), yang dilaksanakan pada 34 bank di 6 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Rekomendasi kepada perbankan di negara-negara ASEAN tersebut antara lain adalah:

1. Membuat dan menerapkan strategi keuangan berkelanjutan sejalan dengan, atau lebih ambisius daripada agenda nasional masing-masing negara dalam menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
2. Membuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, seperti regulator, asosiasi perbankan dan LSM, untuk meningkatkan kapasitas pada keuangan berkelanjutan, serta bersama-sama mengembangkan pedoman bagi perbankan yang berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian tersebut adalah perbankan di Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian organisasi dalam melakukan implementasi perbankan berkelanjutan. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019 pada bulan Desember 2014, dan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mulai berlaku pada tahun 2019. Oleh karena itu, menurut Armstrong (2009) untuk mencapai implementasi perbankan berkelanjutan yang sesuai dengan *roadmap* dan POJK tersebut diatas, maka diperlukan proses perencanaan yang matang, implementasi yang sistematis, dan pelibatan pemangku kepentingan yang terkenan dampak dari regulasi tersebut.

 Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi industri perbankan mewujudkan perbankan berkelanjutan di Indonesia menjadi penting dilakukan, terutama yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan hidup. Menurut Hadad et al. (2015), implikasi dari isu sosial dan lingkungan hidup akan mempengaruhi industri perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa implikasi tersebut antara lain:

1. Perbankan akan mengalami risiko pembiayaan/kredit yang lebih besar disebabkan oleh *default* (kegagalan pembayaran) oleh debitur. Kegagalan ini sebagai akibat pelanggaran ketentuan dan ketidakpedulian terhadap lingkungan.
2. Perhatian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan merupakan *competitive advantage* bagi perusahaan, karena tren masyarakat dunia saat ini adalah penerimaan yang luas terhadap perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan dan sosial, sehingga potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan semakin besar.
3. Kebijakan *green/sustainable financing* akan memberikan kontribusi positif jangka panjang bagi pembangunan ekonomi terkait *energy and food security.* Oleh karena itu, kedepan perbankan diharapkan untuk lebih berperan dalam pembiyaan proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial.

Penelitian penerapan keuangan berkelanjutan pada Industri Keuangan dengan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri (BSM) pernah dilakukan oleh Lucky Nugroho, Ahmad Badawi & Nurul Hidayah dengan judul penelitian “Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Bank Syariah” (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah). Penelitian dilakukan pada saat pelaksanaan keuangan berkelanjutan (SF) di BSM belum wajib menerapkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan No. 51 / POJK. 3/2017. Hasil penelitian dengan data sekunder periode penerapan keuangan berkelanjutan produk keuangan dari BSM pada periode 2017-2018 telah mencapai porsi 29,56% khususnya portofolio seluruh segmen pembiayaan pada Desember 2018. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan keuangan berkelanjutan di BSM sudah cukup baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lucky Nugroho, Ahmad Badawi & Nurul Hidayah namun penelitian kali ini lebih menitikberatkan pada penerapan keuangan berkelanjutan pada bidang pembiayaan segmen Korporasi di BSM tahun 2018. Hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan penerapan keuangan berkelanjutan segmen Korporasi di Bank BNI tahun 2018. Pemilihan Bank BNI menjadi pembanding karena BNI menjadi salah satu bank ‘First Movers on Sustainable Banking’ yang diinisiasi oleh OJK. Sejak tahun 2015 BNI berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi keuangan berkelanjutan.

Pemilihan penelitian penerapan keuangan berkelanjutan pada segmen Korporasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan segmen Korporasi memiliki limit pembiayaan dengan nilai besar yaitu di atas Rp50 miliar ssampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank.
2. Pembiayaan Korporasi diberikan kepada nasabah dengan sektor industri dengan skala besar, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun Swasta.
3. Sektor industri dan bidang usaha pada pembiayaan segmen Korporasi memberikan dampak yang signifikan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam.
4. Sektor industri dan bidang usaha pada pembiayaan korporasi sebagian besar merupakan Kegiatan Usaha Keuangan Berkelanjutan (KUBL) sesaui pedoman teknis Keuangan Berkelanjutan dari OJK, antara lain sektor industri Pertambangan, Pertanian, Perindustrian dan Kontruksi.

## I.2. Perumusan Masalah Penelitian

1. Berapa total portofolio pembiayaan segmen Korporasi di Bank Syariah Mandiri tahun 2018.
2. Berapa total portofolio pembiayaan segmen Korporasi di Bank Syariah Mandiri yang termasuk dalam kegiatan keuangan berkelanjutan tahun 2018.
3. Berapa prosentase portofolio pembiayaan/kredit segmen Korporasi yang masuk kriteria keuangan berkelanjutan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI) tahun 2018.

## I.3. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menganalisa tentang penerapan keuangan berkelanjutan di Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan segmen Korporasi. Penelitian dilakukan selama 3 bulan pada Tahun 2019 bertempat di Jakarta. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan telaah dokumen berupa data laporan keuangan (Annual Report ), Laporan Keuangan Berkelanjutan dan Portofolio pembiayaa pada segmen Korporasi. Informan penelitian ini adalah *person in charge* pada unit-unit kerja yang menangani atau terlibat langsung dalam keuangan berkelanjutan dan unit kerja pengelola pembiayaan segmen korporasi.

## I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### I.4.1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar portofolio pembiayaan segmen Korporasi di Bank Syariah Mandiri tahun 2018.
2. Untuk mengetahui total portofolio pembiayaan segmen Korporasi di Bank Syariah Mandiri yang termasuk dalam kegiatan keuangan berkelanjutan tahun 2018.
3. Untuk mengetahui prosentase implementasi keuangan berkelanjutan di Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia bidang pembiayaan segmen Korporasi tahun 2018.

### I.4.2. Manfaat Penelitian

Terdapat tiga pihak yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pengetahuan keuangan berkelanjutan di Indonesia khususnya perbankan syariah, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang penerapan keuangan berkelanjutan pada pembiayaan segmen Korporasi pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.
2. Bagi pejabat penanggung jawab keuangan berkelanjutan di OJK, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung penerapana keuangan berkelanjutan di Bank Syariah dan Bank Konvensional.
3. Bagi pejabat penanggung jawab keuangan berkelanjutan dan pemegang saham di BSM, penelitian ini bermanfaat untuk mempersiapkan langkah-langkah dan upaya dalam rangka implementasi keuangan berkelanjutan pada seluruh segmen bidang pembiayaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). KBBI Daring. Retrieved February 11, 2019, from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah (2007).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia SE No.15/28/DPNP tanggal 31 Januari 2013 (2013).

Bappenas. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (2011).

Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Dore, R. (2008). Financialization of the global economy. *Industrial and Corporate Change*, *17*(6), 1097–1112.

DSN MUI. Fatwa DSN MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah (2018). Indonesia.

Hadad, M. D., & Maftuchah, I. (2015). *Sustainable Financing*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hardjasoemantri, K., & Supriyono, H. (2014). *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Retrieved from http://repository.ut.ac.id/4372/1/LING1121-M1.pdf

Hasibuan, M. S. P. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ikatan Bankir Indonesia. (2013). Kode Etik Bankir Indonesia. Retrieved August 23, 2018, from https://ikatanbankir.or.id/profil-ikatan-bankir-indonesia-ibi/

Indriyanto. (2012). *Menghayati Makna Peringatan Hari Bumi*. Bandar Lampung. Retrieved from http://staff.unila.ac.id/indriyanto/files/2012/04/Hari-Bumi.pdf

Jalal. (2016). Bagaimana Sebaiknya Pengelolaan Dana CSR? Retrieved August 24, 2018, from https://www.republika.co.id/berita/koran/csr-koran/16/01/12/o0twrq1-bagaimana-sebaiknya-pengelolaan-dana-csr

Jalal. (2017). Belajar dari Dua Pakar Keuangan Berkelanjutan Global. Retrieved from https://indonesiana.tempo.co/read/116384/2017/09/12/jalal.csri/belajar-dari-dua-pakar-keuangan-berkelanjutan-global

Kementerian Lingkungan Hidup RI. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

Kementerian Lingkungan Hidup RI. Nota Kesepahaman Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Indonesia tentang Koordinasi Peningkatan Peran Sektor Perbankan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (No.15/MENLH/12/2010; No.12/84/KEPGBI/2010) (2010).

Kotler, P., & Nance, L. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons Inc.

Kuhlman, T. (2010). What is Sustainability? *Sustainability*, *2*(11). Retrieved from http://www.mdpi.com/2071-1050/2/11/3436/htm

Nasution, M. I. P. (2015). *Jenis-Jenis Bank diIndonesia*. Jakarta. Retrieved from https://www.academia.edu/12280590/Jenis-Jenis\_Bank\_di\_Indonesia

Neviana. (2010). Triple Bottom Line: Lebih dari Sekadar Profit. Retrieved from https://swa.co.id/swa/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekadar-profit

Otoritas Jasa Keuangan. Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan (2014).

Otoritas Jasa Keuangan. (2014b). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019*.

Otoritas Jasa Keuangan. Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 (2015).

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (2017).

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistik Perbankan Indonesia April 2018*. Jakarta. Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---April-2018/SPI April 2018.pdf

Pedoman teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

PT Bank Syariah Mandiri. (2018). *Annual Report 2018*. Jakarta. Retrieved from https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annual-report/AR-BSM-2017-Lap-Manajemen-Indonesia.pdf

PT Bank Syariah Mandiri. (2018). Sejarah BSM. Retrieved July 19, 2018, from https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah

Salim, E. (2010). Hadapi Perubahan Iklim Seperti Berperang. *Jurnal Prisma*, *29*, 71–80.

Sparta, Sparta, Dita Ayu (2016), [Dampak Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Profitabilitas Perusahan](http://journal.ibs.ac.id/index.php/jkp/article/view/28), *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 13 (1), P.35-54

Sparta, Sparta (2010), [Analisis Capm, Apt, Monday Effect Dan Efisiensi Pasar Modal Pada Sektor Keuangan Di Bei (Periode Januari–Juni 2010)](https://scholar.google.com/scholar?cluster=14296557062984602091&hl=en&oi=scholarr), *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 7 (1), P.46-65

Stampe, J., & Loh, L. (2017). *Sustainable Banking in ASEAN: Addressing ASEAN’S Forests, Landscapes, Climate, Water, Societies*. Gland Switzerland.

Stuart, V. (2003). *Pengantar Hukum Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

United Nations Development Programme. (2018). Background on SDGs. Retrieved July 28, 2018, from http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background/

Worland, J. (2015). Climate Change Could Wreck the Global Economy.

World Wildlife Fund. (2019). Tentang WWF. Retrieved February 17, 2019, from https://www.wwf.or.id/tentang\_wwf/